

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM
RESTRUKTURISASI UTANG PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN
PAILIT MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

Oleh:

Abed Nego Tampubolon, NIM. 1814101078

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) bagaimana pengaturan hukum mengenai restrukturisasi utang dalam sistem hukum positif di Indonesia, dan (2) bagaimana perlindungan hak serta kepentingan kreditur dalam proses restrukturisasi utang pada perusahaan yang telah dinyatakan pailit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada studi literatur atau dokumen hukum. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini memusatkan perhatian pada analisis peraturan tertulis serta bahan hukum lainnya. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap dokumen hukum yang relevan, termasuk bahan hukum primer, sekunder, tersier, maupun referensi non-hukum yang mendukung. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) diperlukan pembaruan regulasi terkait restrukturisasi utang dalam konteks hukum kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) di Indonesia, karena masih terdapat kekosongan norma hukum dalam mengatur restrukturisasi utang selama proses tersebut berlangsung; dan (2) bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dalam UU Kepailitan dan PKPU antara lain tercermin dalam ketentuan *actio pauliana*, yakni hak bagi kreditur untuk membatalkan tindakan hukum yang dilakukan debitur apabila tindakan tersebut tidak bersifat wajib dan merugikan kepentingan kreditur.

Kata Kunci: Restrukturisasi, Kreditur, Debitur, Perlindungan Hukum

**LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS IN DEBT RESTRUCTURING
OF COMPANIES DECLARED BANKRUPTCY ACCORDING TO
INDONESIAN POSITIVE LAW**

By:

Abed Nego Tampubolon, NIM. 1814101078

Legal Studies Program

ABSTRACT

This study aims to examine: (1) the legal framework governing debt restructuring under Indonesian positive law, and (2) the protection of creditors' rights and interests during the debt restructuring process in companies that have been declared bankrupt. The research employs a normative legal approach, which focuses on analyzing legal norms and literature. This method is appropriate because the study is centered on examining written laws and other relevant legal documents. The legal materials used include both primary and secondary sources. Data collection was conducted through a literature review, analyzing various legal references—such as statutes (primary sources), scholarly commentary (secondary sources), as well as tertiary and supporting non-legal materials. The findings indicate that: (1) there is an urgent need for legal reform to better regulate debt restructuring within the context of bankruptcy and PKPU (Postponement of Debt Payment Obligations) proceedings in Indonesia, as current laws still lack comprehensive provisions on this matter; and (2) the Bankruptcy and PKPU Law offers legal safeguards for creditors, one of which is the *actio pauliana*—a legal mechanism that enables creditors to request the annulment of legal acts undertaken by the debtor that are not obligatory and may harm creditor interests.

Keywords: Restructuring, Creditors, Debtors, Legal Protection